KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 100,57 Triliun
Tanggal : Selasa, 07 September 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp100,57 Triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani alokasi anggaran kementerian-nya untuk tahun 2022 dengan total Rp100.579.698.915.000.

"Untuk alokasi anggaran Kementerian PUPR dengan total Rp100,57 triliun telah sama dengan yang ada dalam nota keuangan atau raker yang kemarin," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam raker bersama DPR RI kemarin.

Menteri Basuki mengatakan atas nama pemerintah pihaknya mengucapkan terima kasih atas persetujuan RKA-KL tahun 2022 dengan beberapa catatan yang akan ditindaklanjuti. Beberapa catatan itu adalah tentang prioritas program padat karya dan pengawasannya serta hasil-hasil kunjungan kerja.

"Mungkin tidak semua usulan bisa kami tindak lanjuti karena keterbatasan desain kriteria maupun anggaran yang ada, kami tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan semua usulan yang ada, terutama pada tahun 2022-2023 ini," ujar Menteri Basuki.

Program kerja Kementerian PUPR Tahun 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN).

Melalui beberapa penyesuaian program kerja, Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp100,59 triliun meliputi Belanja Operasional Pegawai (Rp3,12 triliun), Belanja Operasional Barang (Rp2,51 triliun), Anggaran Pendidikan (Rp4,56 triliun), dan Belanja Non-Operasional (Rp90,40 triliun).

- Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,23 triliun, konektivitas sebesar Rp39,70 triliun, permukiman sebesar Rp12,15 triliun, perumahan sebesar Rp5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp2,15 triliun.

Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13,91 triliun.

Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661.000 orang.

Setelah disetujui oleh Komisi V DPR, rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang.

iqbal dwipurnama